"PEMBERANTASAN KORUPSI"
(Pencegahan & Penindakan)

M. Busyro Muqoddas
Pimpinan KPK

bphn

Disampaikan dalam Kegiatan :
Continuing Legal Education, Selasa 9 April di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Cililitan Jakarta Timur

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KAJIAN ONTOLOGi + AKSIOLOGI

Bpkn

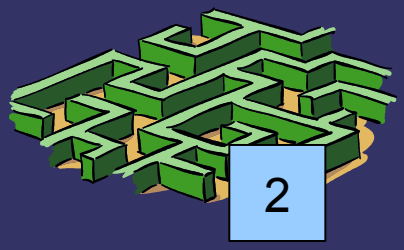

Negara manakah yang paling kaya di dunia?

bphn

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia

bumi ciptaan Tuhan

dengan keindahan dan kekayaan alam yang

luar biasa.

bphn

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Tahukah Anda

Hutan Hujan Tropis Sumatera:

Situs Warisan Dunia Unicef, Rumah Berbagai Makhluk Hidup

terancam
PUNAH

langka

bphn

Indonesia luar biasa

Kekayaan hutan

- Sebagian dari hutan tropis (paru-paru dunia) di dunia terdapat di Indonesia
- Hutan terluas no. 3 di dunia
- Kaya dengan keanekaragaman hayati
  15,3% *dari* ***5.131.100*** *keanekaragaman hayati di dunia terdapat di Indonesia*

bphm

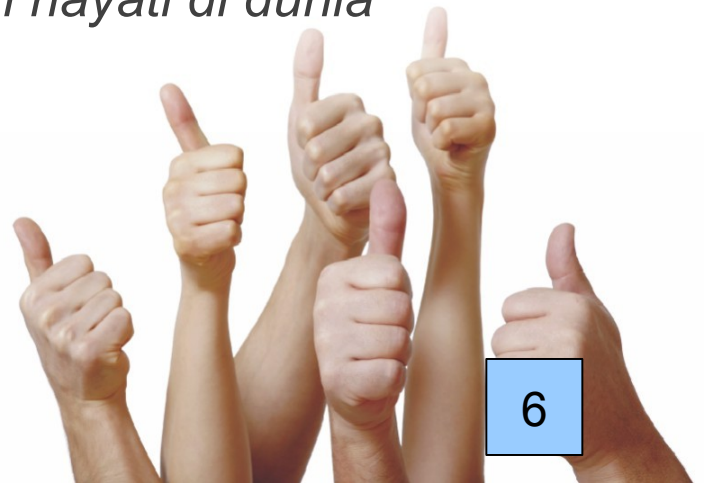

Indonesia luar biasa

Kekayaan tambang

- Penghasil timah no. 2 di dunia
- Pengekspor batu bara terbesar no. 3 di dunia
- Penghasil tembaga terbesar no. 3 di dunia
- Pengekspor LNG terbesar no. 3 di dunia
- Salah satu negara penghasil minyak bumi

bphn

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia luar biasa

Kekayaan laut

- Luas wilayah perairan Indonesia:
  5,8 juta km^2 =70% dari luas total Indonesia
- Posisi strategis sebagai poros utama lalu lintas perdagangan internasional
- Sumber daya laut dengan potensi ekonomi:
  USD 800 M = Rp 7.200 T/tahun = 6X APBN 2011

bphn

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Keuangan Negara

APBN 2011

Pendapatan: Rp1.086 T

Belanja: Rp1.202 T (-114 T)

Hutang Negara

Hutang luar negeri Indonesia per September 2011: Rp1.754,91 T

Bunga: Rp115,21 T/tahun

bbhn

KERUSAKAN LINGKUNGAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Mengapa kekayaan yang dimiliki negara Indonesia belum membuat rakyat Indonesia makmur?

bphm

bpkm

KORUPSI MERUSAK LINGKUNGAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KORUPSI MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

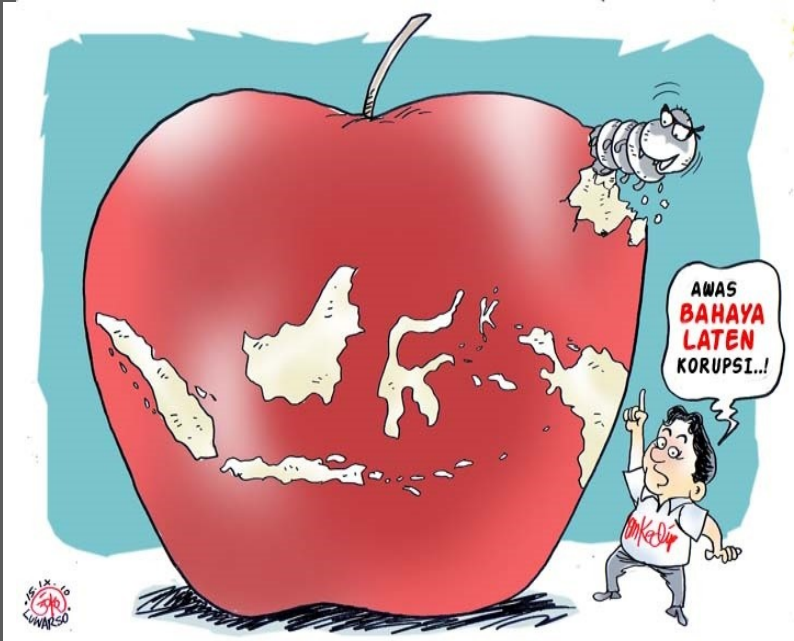

CORRUPTION

bphn

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK (2007-2011)

Menyelamatkan kerugian keuangan negara:

- Penyelamatan keuangan negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) yang dapat dicegah pada 25 kementerian/lembaga sebesar **Rp2.876.296.051.256**
- Penyelamatan kekuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar **Rp152.425.623.301.773**
- Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara TPK yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah sebesar **Rp874.837.777.295** (uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, dan ongkos perkara)

bpkm

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Rp 152,9 T Total aset/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan **KPK** 2011

- 99,65% dari sektor hulu migas
  (aset-aset migas milik negara yang tidak pernah tercatat oleh pemerintah)
- 0,35% dari pengalihan hak barang milik negara (BMN)

Rp 134,7 M Total kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan **KPK** 2011

- Berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK): uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, ongkos perkara
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah

bphn

Kerugian keuangan negara

dari penanganan TPK yang berhasil diselamatkan **KPK**

2008 - 2011

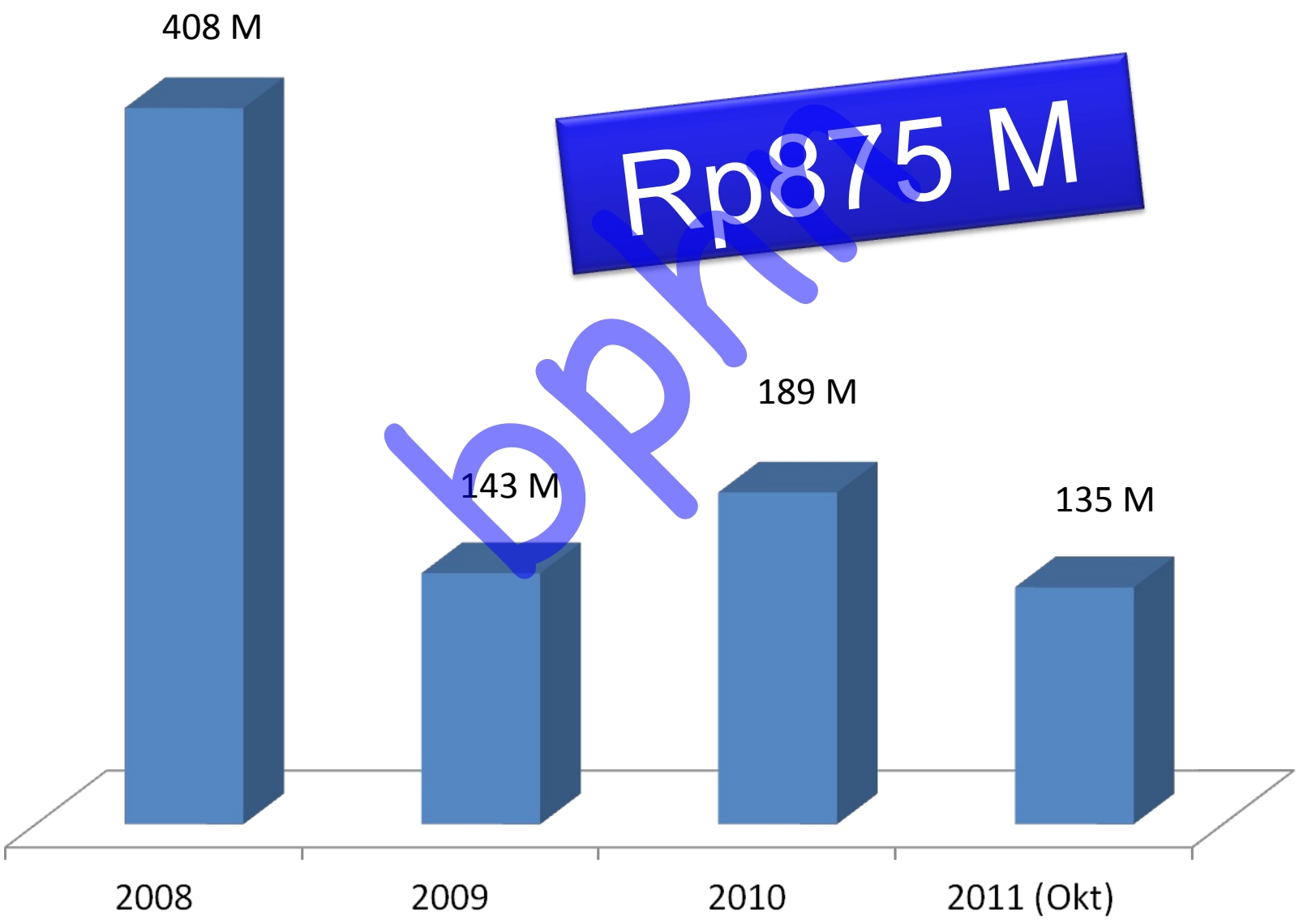

Rp875 M

bpk

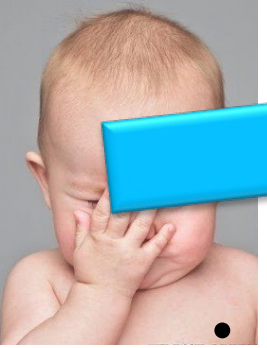

Mari kita renungkan …

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Ayam Mati di Lumbung Padi

- Tambang Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua:
  penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia
- PT Freeport Indonesia:
  Pengelola tambang Grasberg dengan kepemilikan saham
  →Freeport-McMoRan Copper& Gold Inc. (AS): 81,28%, Pemerintah Indonesia: 9,36%, PT. Indocopper Investama: 9,36%
- Penghasilan Freeport dalam setahun: US$ 4,1 M
- Royalti untuk Pemerintah RI: 1% (emas)& 1,5%-3,5% (tembaga)
- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (Nov 2010):
  183 kab merupakan daerah tertinggal. 27 kab berada di Provinsi Papua (terbanyak).
- Persentase angka kemiskinan di Papua:
  34,88% > rata-rata nasional (13,33%)

bphn

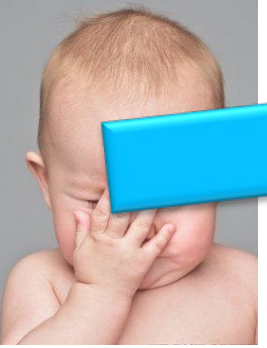

Mari kita renungkan ...

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Katanya Penghasil Garam, Kok, Mengimpor Garam?

- Panjang pesisir pantai Indonesia:
  90.000 km → potensi penghasil bahan baku garam
- kebutuhan garam nasional :
  855.000–950.000 ton → konsumsi &1.150.000–1.345.000 ton → industri
- Produksi garam:
  307.000 ton/tahun
- Data impor garam Indonesia:
  70% garam dapur (1,63 juta ton)

ANTARA

Petani garam

A A A

Impor Garam 25 Ribu Ton Diprotes Petani

Selasa, 18 Oktober 2011 09:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Petani garam di Madura memprotes keras kebijakan Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian yang mengizinkan PT Cheetham Garam Indonesia mengimpor garam sebanyak 25 ribu ton.

Impor garam tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan, apalagi diimpor saat musim panen garam.

H Abdul Wakhid, petani garam asal Madura menyatakan

bphn

Penanganan Kasus TPK
2004 - 2012

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Anggota DPR/DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	**65**
Menteri/Kepala Lembaga	0	1	1	0	1	1	2	0	0	**6**
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	**4**
Komisioner/Dosen	0	3	2	1	1	0	0	0	0	**7**
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	**8**
Walikota/Bupati&Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	3	**31**
Eselon I, II, III	2	9	15	10	22	14	12	15	7	**106**
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	**5**
Jaksa	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	15	**69**
Lain-lain	0	6	1	2	4	4	9	3	2	**31**
Total	**4**	**23**	**29**	**27**	**55**	**45**	**65**	**41**	**45**	**332**

bphn

Permasalahan Umum

- Hak dan Penggunaan Tanah
- Ketersediaan Pembiayaan atau Kredit
- Sisi Penawaran dan Alokasi *Input*
- Standarisasi dan Sertifikasi Produk
- Pemasaran dan distribusi (tata niaga)
- Pengembangan Agribisnis

bphn

Hak dan Penggunaan Tanah

- Kepemilikan (ganda atau sengketa)
- Sertifikat (lambat, kompleks, dan mahal)
- Hak Guna (alokasi)
- Kegiatan Jual Beli (Perubahan Peruntukan)

Aktivitas pemerasan, penyuapan dan gratifikasi sangat berpotensi terjadi dalam sub sistem ini

bphn

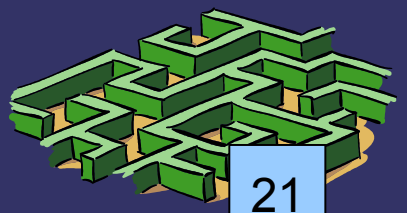

Ketersediaan Pembiayaan atau Kredit

- Sangat penting dan harus tersedia
- Alokasi kredit bersubsidi dari pemerintah (benih, pupuk, alat pertanian, bahan kimia, pakan)
- Pembayaran fee dan persentase pembayaran pada saat pemberian pemberian dan kredit
- Praktek ijon dan tengkulak (keterbatasan akses kepada lembaga keuangan)

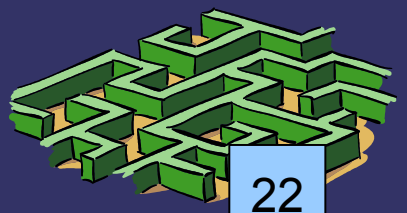

Sisi Penawaran dan Alokasi Input

- Pengadaan dan pemberian izin barang-barang input (pupuk, benih, bahan kimia) → kualitas rendah, kuantitas tidak mencukupi, harga tinggi
- Kolusi antara sektor pemerintah dan swasta → peningkatan biaya produksi pangan
- Mengurangi kompetisi diantara sektor input karena kurangnya peluang mendapatkan kontrak dari pemerintah
- Rent seeking → lobi politik dan penyuapan

bpkm

HAKEKAT ONTOLOGY

- Yang "Ada"
- Yang "Meng-Ada"
- Yang " Peng-Ada"

MAKNA CAUSALITAS ANTARA : "Yang Ada – Yang Peng Ada"

AL – IKLAS

Muatan Ontologi

1. Katakanlah (Muhammad) : "Dialah Allah, Yang Maha Esa
2. Allah tempat minta segala sesuatu
3. (Allah) tak beranak & tak diperanakan
4. Dan tidak ada seseuati yang setara dengan DIA

AL – Ma'un

Muatan Ontologi, Aksiologi & Epistemologi

1. Tahukah Kamu (Orang) yg Mendustaka Agama ? → Ontologi
2. Orang Yang Menghardik Anak Yatim → Aksiologi
3. Dan tak Memberi Makan Orang Miskin → Epistemologi

bpkm

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

ALBALAD

Muatan Ontologi & Asiologi

10 Dan Kami Telah Menunjukan Kepadanya Dua Jalan → Ontologi
11 Tetapi Dia tak (Menempuh) jalan yg mendaki lagi sukar → Ontologi
12 Tahukah Kamu Apakah Jalan yg Mendaki Lagi Sukar Itu? → Ontologi
13 Yaitu Melepaskan Budak dari Perbudakan → Aksiologi

Ali Imran

Ontologi

190 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Dan pergantian malam dan siang terdapat tanda tanda (Kebesaran Allah) bagi orang yang berakal

191 Ya, Tuhan Kami, Tidaklah engkau Menciptakan semua ini sia-sia: Mahasuci Engkau, Lindungilah Kami Dari Azab Neraka

bphn

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

ONTOLOGi

↑ ↓

AKSIOLOGI

Alam Ukhrowi, (Kesejatian Kehidupan), Kesadaran Hisab Atas Amal, Kejujuran, Keadilan,

Kesetaraan, Kemaslahatan, Kemanusiaan, Keberlangsungan, Keseimbangan, Keberpihakan kepada Kebenaran, Pengutamaan Nilai daripada formalitas, keberkahan, Jiwa yang Tenang

bphn

Persepsi, konsep, Paradigma, Studi Makna (Dasar & Relasional), Konteks, Imajinasi, Refleksi Atas Fakta Dengan Alam Nomenon/Transendental/Konteks Dll

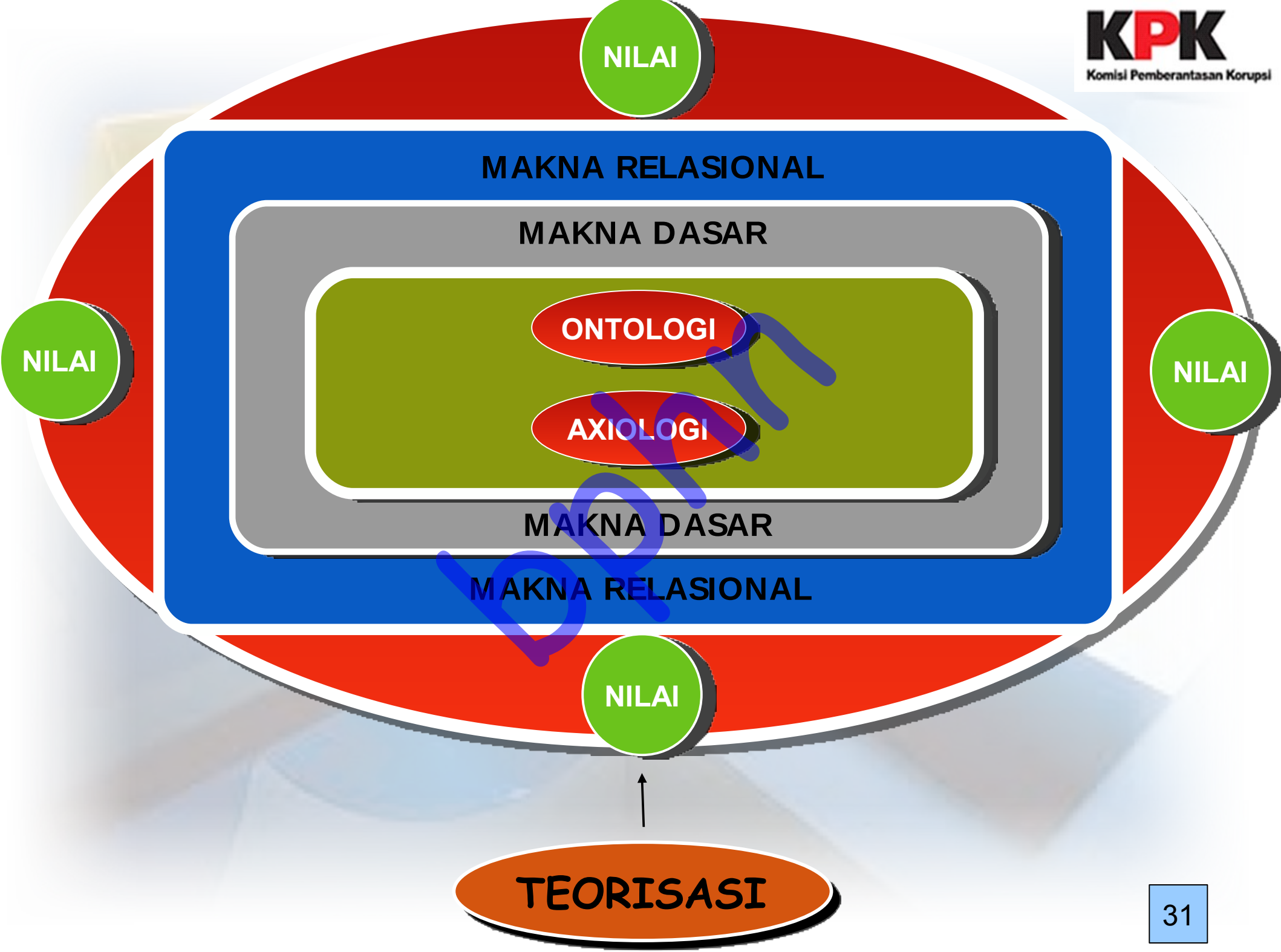

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

bpkm

TEORISASI

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Al Ma'un Ayat (2-3)

Makna Relasional (Konteks, Problem, Kebutuhan Sosial) Sistem Sosial Politik, UU, Kebijakan Publik & Vonis Hakim yang tidak Berkeadilan Tidak Berkeadilan

"Obyek Ontologi Deistik"

Al Balad Ayat (13)

Makna Relasional :
Sistem Sosial Politik & Paradigma Ilmu yang Liberatif, Humanistik & Transendental

bpm

1.LIBERALIASI
2.HUMANISASI
3.TRANSENDENS

MORALITAS ILMU

MORALITAS ILMU HUKUM

- ILMU HUKUM PROFETIK
- HUKUM PROFETIK

SPIRITUALITAS ILMU HUKUM

- AGAMA
  - QATHI
  - DZANNY
  - IJTIHAD
  - SIMBOL-SIMBOL
  - FENOMENA ALAM
- ETIKA MORAL TRADISI
- BUDAYA
- FENOMENA BUDAYA
- FENOMENA ALAM
- REALITAS KETIDAKADILAN
- MAZHAB ILMU HUKUM
  - SOSIAL
  - POLITIK
  - HUKUM
  - HAM
  - RUU

- SOCIOLOGICAL
- JURISPRUDENCE
- INSTRUMENTALISM
- PROGRESSIVE
- PROFETIK (PROPHETIC)
- CRITICAL LEGAL STUDIES

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Bpkn

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

RUU

- Grounded Research
- Seminar
- Uji Sahih Publik
- Revisi
- Ajukan Ke DPR

} Draf Akademik

Proses DPR

- Pengawalan
- Pengawasan
- Transparansi
- Pelibatan CSO

Penindakan Integratif

- Evaluasi Fenomena Parpol & Praktek Birokrasi
  - K
  - L
- Evaluasi Aturan-aturan Sistem Politik (Oligarchi Dinasti Demokrasi Modern)
- Lemahnya Posisi Rakyat
- RUU Sistem Kepolitikan
- Revisi KUHP- UU Tipikor - KUHAP

bphn

HUKUM

- PENORMAAN MORAL, ETIKA, AGAMA, DAN KULTUR
- PERWUJUDAN FREE WILL
- PERWUJUDAN MANUSIA OTENTIK
- PERWUJUDAN RUH
  - Hati Bersih
  - Akal Budi
  - Spiritual
- MUARA DIALEKTIKA AKHLAK DENGAN PERUBAHAN
- MUARA NILAI-NILAI ROHANI - JASMANI

↓

FUNGSI HUKUM

↓

1

DAKWAAN,TUNTUTAN, DAN VONIS:

a. Pembeda Benar-Salah
b. Pembeda Hak – Wajib
c. Purifikasi Konsep Manusia – Hukum
d. Pilihan kriteria pilihan undang-undang & Doktrin - Doktrin Hukum.
e. Pertimbangan Dimensi & Muatan Nilai-Nilai Agama, Etika, Moral, Transformasi Sosial Budaya, Proporsi Restitutio In Integrum, Pencabutan Hak, dan Pemberian Hak.
f. Konkretisasi nilai – nilai kebenaran, keadilan, kesetaraan, Martabat Kemanusiaan Universal

bphn

FUNGSI HUKUM :

2

KEBIJAKAN PUBLIK (Peraturan Per – UU - an):

a. Berbasis Nilai-Nilai Profetik
b. Berbasis Keseimbangan Tradisi Dengan Kemajuan
c. Perwujudan Social Contract
d. Perwujudan Ruh Rechtsstaat Demokrasi - HAM
e. Transformasi Sistem Sosial, Sistem Budaya dan Sistem Politik Yang Bermartabat

bphn

TAFSIR PASAL 2 (Ayat 2) UU 31 Tahun 1999

Penjelasan Tentang Hukuman Mati :

"Keadaan Tertentu" :

1. Negara dengan keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku.
a. Tafsir Situasi (Ontologi, Axiologi, Epistemologi)
b. Tafsir Undang-Undang :

TELEOLOGIS

- **Background/ Draft Akademik RUU 31/1999**
- **Makna Dasar**
- **Makna Reasional**
  - **Sosial**
  - **Ekonomi**
  - **Kebudayaan**

bpkn

2. Bencana Alam Nasional :

a. Fisik
b. Ekonomi
c. Kesehatan
d. Pendidikan
e. Moral (Dekadensi Moral)

3. Pengulangan TPK

4. Negara Krisis Ekonomi & Moneter :

a. Pendekatan Empirik	Induktif
b. Pendekatan Teoritik	Deduktif
c. Kriteria Krisis	Ahli
d. Dampak Krisis	Riset

Unsur :

a. Kerugian Keuangan Negara

b. *Social Cost of Corruption*

NILAI-NILAI ESENSIAL HUKUM

↓

FILSAFAT NILAI

↓

IDEOLOGI HUKUM

↓

IDEOLOG PENEGAK HUKUM

↓

IDEOLOG PENYELIDIK, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM KPK

bphn